

DAFTAR PUSTAKA

- Smith (2019) jurnal "Taxation Trends in the Modern Era"
- Indra Mahardika Putra, S.E., Ak., M.Ak. (2022). Dasar-dasar Memahami Perpajakan.
- Adrian Sutedi (2019). Sistem Perpajakan di Indonesia.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, Kementerian Keuangan. (2008). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia, Kementerian Keuangan. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). PER-24/PJ/2021 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan/pemungutan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- LennyPangabea/publication/370941832_Dominasi_Pemahaman_Peraturan_Perpajakan_Terhadap_Kesadaran_Wajib_Pajak_Orang_Pribadi_Akan_Sanksi_Pajak/links/66b42bac51aa0775f270dcb7/Dominasi-Pemahaman-Peraturan-Perpajakan-Terhadap-Kesadaran-Wajib-Pajak-Orang-Pribadi-Akan-Sanksi-Pajak.pdf
- Rahardjo, Mudjia. "Metode pengumpulan data penelitian kualitatif." (2011).
- Sumampouw, Archindo Gregorius, and Anneke Wangkar. "Evaluasi pemotongan penyeteroran dan pelaporan PPh 23 atas pendapatan jasa pada CV. Palakat." Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) 5.2 (2022): 627-6